JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI PROGRAM KB METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI DESA TUNGKUP KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Amalia Hasanah[1], Saidah Hasbiyah[2], M. Noor Fuadi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: amaliahasananh556@gmail.com

ABSTRAK

Keluarga Berencana (KB) merupakan ikhtiar untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia melalui pengaturan jarak dan usia ideal kelahiran anak, pengaturan kehamilan, serta promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi guna mewujudkan keluarga berkualitas (WHO, 2023). Penelitian ini berangkat dari kondisi di Desa Tungkup yang menunjukkan sejumlah persoalan, yaitu masih rendahnya keikutsertaan pasangan usia subur dalam program KB MKJP, minimnya pemahaman masyarakat disertai beredarnya mitos seputar MKJP, serta terbatasnya sarana dan dukungan layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan penentuan informan melalui teknik *purposive sampling* terhadap 10 orang informan. Data dihimpun melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian diolah melalui tahapan analisis data kualitatif berupa analisis domain, taksonomi dan komponensial, serta analisis tema *cultural*. Keabsahan data diuji melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, serta pelaksanaan *membercheck* (Sugiyono, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong cukup baik, sebagaimana tampak pada sub variabel berikut. *Pertama*, indikator ukuran kebijakan tergolong kurang baik, sedangkan tujuan kebijakan sudah cukup baik. *Kedua*, sumber daya manusia (SDM) tergolong cukup baik dan ketersediaan anggaran juga cukup baik. *Ketiga*sisi karakteristik organisasi formal tergolong kurang baik, begitu pula karakteristik organisasi informal. *Keempat*, komitmen para pelaksana sudah cukup baik, namun penerimaan masyarakat masih kurang baik. *Kelima*, koordinasi antarorganisasi sudah cukup baik, demikian pula komunikasi antara petugas dan masyarakat. *Keenam*, dukungan lingkungan sosial masih kurang baik, sementara lingkungan ekonomi dan lingkungan politik sudah cukup baik. Faktor yang mendukung pelaksanaan program meliputi dukungan pemerintah, komitmen para pelaksana, serta layanan KB yang diberikan secara gratis. Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya partisipasi pasangan usia subur, minimnya sosialisasi dan komunikasi program, dan kuatnya pengaruh mitos serta informasi yang keliru di masyarakat. Saran bagi pemerintah dan instansi terkait, disarankan menambah jumlah tenaga kesehatan dan PLKB, melengkapi sarana-prasarana, serta menyediakan anggaran yang memadai; bagi pelaksana program KB MKJP disarankan lebih sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung; masyarakat Desa Tungkup diharapkan berperan aktif; dan bagi peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan kajian lanjutan mengenai implementasi Program KB MKJP.

Kata Kunci: Implementasi, Program, KB MKJP

ABSTRACT

(Family Planning) is an effort to build a happy small family by managing the timing, spacing, and ideal age of childbirth, along with promotion, protection, and assistance in line with reproductive rights so that a quality family can be realized (WHO, 2023). This research starts from conditions in Tungkup Village, where reproductive-age couples still rarely use long-term modern contraceptives, understanding remains limited, myths about long-term contraception persist, and health-service facilities and support are still limited. It aims to describe how the long-term family planning program is carried out in Tungkup Village, Labuan Amas Utara District, Hulu Sungai Tengah Regency, along with the factors that shape it. A qualitative descriptive approach was applied, with informants chosen through purposive sampling, covering 10 people.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Data were gathered through observation, interviews, and documentation, then processed through domain analysis, taxonomy and componential analysis, and cultural theme analysis. Data credibility was checked through prolonged engagement, persistence, triangulation, negative-case analysis, reference materials, and member checks (Sugiyono, 2022). Overall, implementation of the MKJP program in Tungkup Village, Labuan Amas Utara District, Hulu Sungai Tengah Regency runs fairly well across its sub-variables. On policy scope and goals, the scope is not yet strong although the goals are adequate. Human resources and budget are both adequate. Formal and informal organizational traits are still weak. Implementer commitment is adequate, though community acceptance is weak. Inter-agency coordination and staff-community communication are fairly good. Regarding environment, social support is weak while the economic and political climate are adequate. Enabling factors include government support, implementer commitment, and free KB services, while the main obstacles are low participation among reproductive-age couples, limited program socialization, and persistent myths and inaccurate information. Recommendations include adding health workers and PLKB staff, improving facilities and infrastructure, and allocating sufficient budget; MKJP implementers are encouraged to intensify socialization and direct counseling; the Tungkup community is encouraged to participate more actively; and future researchers are encouraged to expand study on MKJP implementation.

Keywords: *Implementation, Program, KB MKJP*

PENDAHULUAN

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,8 juta jiwa pada tahun 2023, naik 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 275,7 juta jiwa (BPS Indonesia, 2023). Lonjakan jumlah penduduk tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, memperluas infrastruktur, serta memperbaiki pelayanan publik (Gugun & Suskim, 2026). Hal ini diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa "Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, dan jarak usia ideal melahir, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujud keluarga yang berkualitas", sedangkan ayat 9 menyatakan bahwa penyelenggaraan program keluarga berencana adalah proses dan cara yang ditempuh pemerintah beserta pemerintah daerah dalam melaksanakan program tersebut (Wicaksana & Rachman, 2018). Regulasi ini diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai lebih cepat melalui pengendalian penduduk yang bijaksana lewat program Keluarga Berencana.

Gerakan Keluarga Berencana dijalankan agar tingkat kelahiran dapat ditekan secara lebih cepat (World Health Organization, 2022). KB bertujuan mewujudkan keluarga kecil yang bahagia melalui pengaturan kelahiran, jarak, dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, serta promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi demi keluarga yang berkualitas (Perpres, 2015). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu turut mengatur kelahiran tanpa mengurangi hak individu, sejalan dengan tujuan umum Program KB yaitu membentuk keluarga kecil yang selaras dengan kondisi sosial ekonomi keluarga melalui pengaturan kelahiran anak, sehingga tercipta keluarga bahagia dan sejahtera yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (Lezafidyahrestiana, 2024). Berdasarkan data terbaru Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih tergolong rendah dibanding metode non-MKJP. Padahal MKJP—yang mencakup IUD, implan, MOW, dan MOP—terbukti lebih efektif untuk jangka panjang, meski belum menjadi pilihan utama

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

masyarakat (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2023; World Health Organization, 2022).

Desa Tungkup berpenduduk sekitar 1.001 jiwa. Dari jumlah tersebut, pengguna KB Implan tercatat 4 orang, KB Kondom 8 orang, sementara KB IUD belum ada penggunanya. Sebagian besar warga justru memilih KB Suntik dan KB Pil, dengan rincian 52 orang menggunakan KB Suntik dan 102 orang menggunakan KB Pil.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Tungkup tercatat 166 orang. Meski demikian, penerapan MKJP masih terkendala oleh rendahnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi minat penggunaan kontrasepsi jangka panjang (Tomi Sah & Valeriani, 2024). Karena itu dibutuhkan strategi implementasi program yang tepat agar masyarakat memahami manfaat MKJP dan bersedia menggunakannya secara berkelanjutan.

Implementasi program MKJP di desa ini penting untuk dicermati karena masih banyak pasangan usia subur yang belum memanfaatkan metode kontrasepsi jangka panjang secara maksimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan warga, akses layanan kesehatan, serta faktor sosial budaya setempat. Atas dasar itu, pelaksanaan program KB MKJP di Desa Tungkup perlu dikaji lebih mendalam untuk memahami bagaimana program berjalan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang bisa ditempuh guna mendorong partisipasi masyarakat. Implementasi yang optimal diharapkan turut mendukung peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat setempat (Paluku et al., 2025).

Pengamatan lapangan atas Program KB MKJP ini menunjukkan beberapa persoalan sebagai berikut: keikutsertaan pasangan usia subur dalam KB MKJP seperti Implan, IUD, Metode Operasi Wanita, maupun Metode Operasi Pria masih rendah karena rasa takut, kekhawatiran akan sakit, dan anggapan bahwa metode tersebut membahayakan kesehatan lantaran memerlukan tindakan operasi serta pemasangan alat pada tubuh mereka. Akibatnya sebagian besar pasangan usia subur lebih memilih metode Non-MKJP seperti kondom, pil, dan suntik karena dinilai lebih aman (*Sumber: Rekap Data Penggunaan KB Kecamatan Labuan Amas Utara Tahun 2026*). Pemahaman yang keliru serta beredarnya mitos seputar MKJP juga masih dijumpai di kalangan masyarakat, yang mengindikasikan bahwa edukasi dan penyampaian informasi program KB belum berjalan efektif dan merata. Selain itu, keterbatasan sarana serta dukungan layanan kesehatan turut menjadi kendala pelaksanaan program KB MKJP, seperti minimnya tenaga kesehatan terlatih, fasilitas pelayanan yang belum memadai, dan jadwal layanan yang belum optimal.

Penelitian sebelumnya oleh Idham Latif (2022), mahasiswa Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu, dengan judul "Implementasi Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di UPT PPKB Kecamatan Indramayu", menyimpulkan bahwa pelaksanaan MKJP belum optimal. Capaian MKJP belum sesuai target, akseptor KB didominasi kaum perempuan, dan PLKB membentuk kelompok-kelompok kecil dengan sasaran WUS, calon pengantin, dan remaja. Erni Yunita, (2023) Program Studi S1 Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dengan judul "Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kecamatan Amuntai Utara". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MKJP telah berjalan cukup baik meski masih dijumpai kendala seperti terbatasnya sumber daya pelaksana, kurangnya penyebaran informasi, rendahnya partisipasi warga, dan minimnya dukungan suamii.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Strauss dan Corbin (dalam Sujarweni, 2020) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik atau cara kuantifikasi lain. Penelitian kualitatif umumnya digunakan untuk mengkaji kehidupan sosial, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, aktivitas sosial, dan hal-hal serupa. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti memilih informan yang dianggap memahami betul persoalan yang dikaji, dengan jumlah sepuluh orang. Teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Leo Agustino, 2022) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu, Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*), Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Spradley (dalam Auliya, 2020) menjelaskan tahapan analisis data kualitatif meliputi analisis domain, taksonomi dan komponensial, serta analisis tema *cultural.* Sugiono (2014:143) menyatakan bahwa uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif mencakup perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan *member check*.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

   Kajian ini mengukur pelaksanaan Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui sejumlah variabel dan indikator kunci. Uraiannya sebagai berikut:

   a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

      Variabel ini menelaah sejauh mana kebijakan Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dirumuskan dan ditetapkan secara jelas (Agustino leo, 2016).

      1) Ukuran Kebijakan

         Ukuran kebijakan tercermin dari apakah sasaran program benar-benar terlayani, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, serta apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

         Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Ukuran Kebijakan terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan hasil yang kurang baik, karena sosialisasi dan edukasi program belum dilaksanakan secara maksimal dan merata ke seluruh masyarakat (Van Meter & Van Horn, 1975).

      2) Tujuan Kebijakan

         Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengatur jarak kelahiran, menekan laju pertumbuhan penduduk, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontrasepsi jangka panjang yang aman dan efektif.

         Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Tujuan Kebijakan terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten

Hulu Sungai Tengah tergolong cukup baik, sebab program ini turut ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak lewat perencanaan keluarga yang lebih baik.

b. Sumber Daya

Sub variabel ini menguraikan berbagai bentuk sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif.

1) Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia mencakup petugas penyuluh KB, tenaga kesehatan, dan pihak lain yang berperan memberikan layanan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kualitas dan jumlah petugas sangat menentukan keberhasilan program MKJP.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Ketersediaan Sumber Daya Manusia terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari keaktifan petugas KB, bidan desa, dan kader dalam memberikan penyuluhan lewat kegiatan sosialisasi dan pelayanan kesehatan. Kehadiran kader dan bidan desa turut membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai manfaat dan penggunaan KB MKJP. Dokumentasi yang diperoleh juga menunjukkan bahwa tenaga kesehatan cukup baik dalam menjalankan tugas pelayanan pemasangan KB MKJP.

2) Anggaran

Anggaran adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program, seperti kegiatan penyuluhan, pelayanan kesehatan, pengadaan alat kontrasepsi, dan kegiatan operasional lain. Ketersediaan anggaran turut menentukan kelancaran program.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Anggaran terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong cukup baik. Namun, ketersediaan anggaran saja belum cukup untuk mendongkrak cakupan peserta MKJP; anggaran yang memadai akan mempermudah pelaksanaan berbagai kegiatan program dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kontrasepsi jangka panjang. Agar tujuan kebijakan tercapai secara optimal, dukungan anggaran perlu diimbangi dengan pengelolaan yang efektif, peningkatan kualitas layanan, dan sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Sub variabel ini menjelaskan kondisi organisasi atau pihak pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada Program KB MKJP di Desa Tungkup.

1) Karakteristik Organisasi Formal

Karakteristik organisasi formal berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, dan aturan kerja yang jelas dalam pelaksanaan MKJP sehingga kegiatan dapat berjalan terarah dan terkoordinasi.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Karakteristik Organisasi Formal terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan hal berikut. Karakteristik organisasi formal dalam Program KB MKJP di Desa Tungkup masih tergolong kurang baik, terlihat dari koordinasi antarpelaksana yang belum maksimal, keterbatasan tenaga

pelaksana, pembagian tugas yang belum berjalan efektif, serta layanan dan sosialisasi yang belum merata ke masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan koordinasi, penambahan tenaga pelaksana, serta pembenahan sistem kerja dan sosialisasi agar Program KB MKJP dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

2) Karakteristik Organisasi Informal

Karakteristik organisasi informal berkaitan dengan hubungan sosial, kerja sama, dan komunikasi antarpetugas di luar struktur resmi yang turut membantu kelancaran pelaksanaan program.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Karakteristik Organisasi Informal terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan hasil yang kurang baik. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan lebih jauh dalam mendukung pelaksanaan Program KB MKJP. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membangun pemahaman masyarakat, membantu menjelaskan manfaat KB MKJP, serta meluruskan anggapan yang keliru. Dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan membuat warga lebih memahami informasi yang benar mengenai KB MKJP, mengurangi kepercayaan terhadap mitos yang beredar, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam Program KB MKJP di Desa Tungkup.

d. Sikap dan Kecenderungan

Sub variabel ini menguraikan sikap pelaksana maupun masyarakat terhadap pelaksanaan program MKJP pada Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1) Komitmen Pelaksana

Indikator ini digunakan untuk melihat kesungguhan dan kepedulian pelaksana dalam mendukung program, yang tercermin dari tanggung jawab mereka dalam memberikan layanan dan menjalankan kegiatan secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Komitmen Pelaksana terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong cukup baik. Kesediaan pelaksana menjalankan kegiatan program menjadi bentuk dukungan nyata terhadap capaian tujuan Program KB MKJP di Desa Tungkup. Komitmen yang tinggi dari pelaksana turut mendukung keberhasilan program karena adanya kesadaran untuk menjalankan tugas secara konsisten. Secara umum, komitmen pelaksana dalam Program KB MKJP di Desa Tungkup dapat dikategorikan cukup baik karena mereka menunjukkan tanggung jawab, kesungguhan, dan kepedulian yang tinggi, meski aspek sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

2) Penerima dari Masyarakat

Penerimaan masyarakat menggambarkan sejauh mana warga menerima dan mendukung program MKJP; semakin baik penerimaannya, semakin mudah program dijalankan.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Penerimaan dari Masyarakat terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong kurang baik. Penerimaan masyarakat menjadi faktor penting bagi keberlangsungan Program KB MKJP. Kondisi ini

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

menandakan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi masih perlu diperkuat agar masyarakat lebih menerima Program KB MKJP.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Sub variabel ini menguraikan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pada Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Desa Tungkup.

1) Koordinasi Antar Organisasi

Koordinasi antarorganisasi merupakan kerja sama antarinstansi terkait, seperti Balai Penyuluhan KB, puskesmas, pemerintah desa, dan kader kesehatan, dalam mendukung pelaksanaan MKJP.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Koordinasi Antarorganisasi terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong cukup baik. Koordinasi tersebut membuat pelayanan berlangsung lebih terarah dan sesuai rencana yang ditetapkan. Kerja sama antara pemerintah desa, PLKB, tenaga kesehatan, dan kader juga membantu memperlancar penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga kegiatan pelayanan berjalan lebih efektif.

2) Komunikasi antar Petugas dengan Masyarakat

Komunikasi ini menyangkut cara petugas menyampaikan informasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat serta prosedur penggunaan MKJP agar program dipahami dengan baik.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Intensitas Komunikasi antara petugas dan masyarakat terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong cukup baik. Petugas berupaya memberikan penjelasan dan pendampingan kepada calon akseptor sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Meski demikian, upaya ini masih perlu diperkuat melalui strategi komunikasi yang lebih efektif, intensif, dan berkelanjutan agar pesan program tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami masyarakat.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sub variabel ini menguraikan kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi keberhasilan Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1) Dukungan Lingkungan Sosial

Dukungan sosial mencakup dukungan keluarga, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar terhadap penggunaan kontrasepsi jangka panjang.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Dukungan Lingkungan Sosial terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong kurang baik. Hal ini tampak dari masih rendahnya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, kuatnya pengaruh mitos, serta informasi yang kurang tepat tentang KB MKJP. Karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pendekatan kepada masyarakat maupun keluarga agar dukungan sosial terhadap kontrasepsi jangka panjang meningkat dan program berjalan lebih optimal. Dokumentasi yang diperoleh juga menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi di Desa Tungkup baru diikuti sebagian warga saja.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

2) Dukungan Lingkungan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat turut memengaruhi kemampuan mereka mengakses layanan kesehatan dan mengikuti program MKJP.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Dukungan Lingkungan Ekonomi terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong cukup baik, sebab pemerintah telah menyediakan pembiayaan dan pelayanan gratis bagi masyarakat. Namun, agar dukungan ekonomi tersebut memberikan hasil optimal, perlu diimbangi dengan sosialisasi yang lebih intensif, edukasi berkelanjutan, dan pendekatan persuasif dari penyuluh KB, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan kader, sehingga masyarakat memahami manfaat KB MKJP dengan benar dan terdorong memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

3) Dukungan Lingkungan Politik

Dukungan politik berkaitan dengan perhatian dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program KB, baik lewat regulasi, bantuan dana, maupun kerja sama antarlembaga.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan pada indikator Dukungan Lingkungan Politik terkait Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong cukup baik, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan kerja sama antarinstansi sudah ada, namun kegiatan sosialisasi dan pelayanan KB belum berjalan rutin dan merata ke seluruh masyarakat. Selain itu, koordinasi antarlembaga yang terlibat masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program lebih efektif. Keterbatasan tenaga pelaksana dan fasilitas pelayanan juga menjadi hambatan di lapangan.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Keberhasilan sebuah program tidak lepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya, baik yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaannya.

a. Faktor Pendukung

Berikut rangkuman hasil wawancara mengenai faktor pendukung Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1) Adanya Dukungan Pemerintah

Pemerintah daerah dan pemerintah desa memberikan dukungan bagi pelaksanaan program KB MKJP melalui sosialisasi, pelayanan kesehatan, serta kerja sama dengan petugas KB dan tenaga kesehatan.

Wawancara dengan Ibu Hj. Antung Salasiah selaku Kabid PPKB Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa telah mendukung pelaksanaan Program KB MKJP, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, pelayanan KB, serta kerja sama dengan tenaga kesehatan, petugas KB, dan pemerintah desa dalam mendukung program di masyarakat.

2) Adanya Komitmen Pelaksana Program

Petugas pelaksana seperti PKB, PLKB, bidan desa, dan kader PPKBD tetap menjalankan tugasnya dengan memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat meski menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Wawancara dengan Ibu Mawarti, S.Sos selaku Koordinator Penyuluh KB menunjukkan bahwa petugas pelaksana Program KB MKJP—PKB, PLKB, bidan desa, dan kader PPKBD—tetap berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka terus berupaya memberikan penyuluhan, pelayanan, dan sosialisasi agar program KB MKJP tetap berjalan di Desa Tungkup.

3) Adanya Pelayanan dan Program KB Gratis
Layanan KB gratis dari pemerintah menjadi salah satu faktor yang meringankan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, untuk mengikuti program KB MKJP.

b. Faktor Penghambat
Berikut rangkuman hasil wawancara mengenai faktor penghambat Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1) Kurangnya Sosialisasi dan Komunikasi Program
Penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat belum merata, sehingga masih ada warga yang kurang memahami program KB MKJP.
Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasbi selaku Penyuluh KB (PLKB) menunjukkan bahwa penyampaian informasi dan sosialisasi Program KB MKJP masih kurang baik. Sosialisasi mengenai KB MKJP belum merata ke seluruh masyarakat sehingga sebagian warga masih kurang memahami manfaat, tujuan, dan cara penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang.

2) Rendahnya Partisipasi Pasangan Usia Subur
Partisipasi pasangan usia subur dalam KB MKJP masih rendah karena masyarakat cenderung memilih metode kontrasepsi yang dianggap lebih praktis dan aman.
Wawancara dengan Ibu Feggy Hermawati, S.Sos selaku Penyuluh KB (PKB) menunjukkan bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam Program KB MKJP masih tergolong rendah, karena sebagian masyarakat lebih memilih metode kontrasepsi lain yang dinilai lebih praktis, mudah digunakan, dan aman, seperti KB suntik atau pil. Diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendekatan kepada masyarakat agar pasangan usia subur lebih memahami manfaat, keamanan, dan efektivitas KB MKJP, sehingga partisipasi dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang dapat meningkat.

3) Masih Kuatnya Pengaruh Mitos dan Informasi yang Kurang Tepat
Sebagian besar informasi tentang KB MKJP masih diperoleh masyarakat dari lingkungan sekitar seperti keluarga, tetangga, atau teman, sehingga memunculkan berbagai mitos dan anggapan yang tidak sejalan dengan fakta menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Profil Program Bangga Kencana Tahun 2023*.
Wawancara dengan Ibu Norliani selaku Kader KB (PPKBD) menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat pelaksanaan Program KB MKJP di Desa Tungkup adalah masih kuatnya pengaruh mitos dan informasi yang kurang tepat di masyarakat. Sebagian warga lebih percaya pada informasi dari keluarga, tetangga, atau lingkungan sekitar dibandingkan penjelasan petugas kesehatan, sehingga muncul rasa takut, ragu, dan kurang percaya terhadap keamanan maupun manfaat KB MKJP, yang membuat minat masyarakat menggunakan kontrasepsi jangka panjang tetap rendah. Kondisi ini menegaskan perlunya penyampaian informasi yang benar dan berkelanjutan, disertai

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama, agar pemahaman warga terhadap KB MKJP semakin baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong cukup baik. Simpulan ini didasarkan pada sub variabel sebagai berikut:
   1. Pertama, Ukuran dan Tujuan Kebijakan Program KB MKJP pada indikator ukuran kebijakan kurang baik, dan indikator tujuan kebijakan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan strategi pelaksanaan program melalui sosialisasi yang lebih intensif, edukasi berkelanjutan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta evaluasi berkala atas capaian target program agar ukuran keberhasilan yang ditetapkan dapat diraih secara lebih efektif.
   2. Kedua, Sumber Daya dalam pelaksanaan Program KB MKJP pada indikator sumber daya manusia (SDM) cukup baik, dan indikator anggaran cukup baik. Hal ini menujukkan bahwa pelaksanaan Program KB MKJP telah ditopang ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari sisi tenaga pelaksana maupun dukungan pembiayaan program.
   3. Ketiga, Karakteristik Agen Pelaksana pada indikator Karakteristik Organisasi Formal kurang baik, dan indikator Karakteristik Organisasi Informal kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya ditopang organisasi pelaksana yang berjalan optimal. Meski struktur organisasi, pembagian tugas, serta keterlibatan PLKB, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader, dan tokoh masyarakat sudah ada, pelaksanaannya masih belum efektif sehingga koordinasi, kerja sama, dan pelaksanaan tugas belum maksimal.
   4. Keempat, Sikap atau Kecenderungan pada indikator Komitmen Pelaksana cukup baik, dan indikator Penerimaan dari Masyarakat kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program KB MKJP tidak semata ditentukan oleh komitmen pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap program.
   5. Kelima, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana paada indikator Koordinasi Antar Organisasi cukup baik, dan indikator Komunikasi antar Petugas dengan Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa petugas telah berupaya menyampaikan informasi mengenai tujuan, manfaat, jenis, serta prosedur penggunaan kontrasepsi jangka panjang sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai Program KB MKJP.
   6. Keenam, Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik pada indikator Dukungan Lingkungan Sosial kurang baik, Lingkungan Ekonomi cukup baik, dan Lingkungan Politik cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan dalam implementasi Program KB MKJP sudah cukup mendukung dari sisi ekonomi dan politik, tetapi masih menghadapi hambatan pada aspek sosial.

b. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program KB MKJP di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi:
   1. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan pemerintah, komitmen para pelaksana program, serta layanan dan program KB yang diberikan secara gratis.

2. Faktor penghambat yaitu rendahnya partisipasi pasangan usia subur, minimnya sosialisasi dan komunikasi program, serta Masih Kuatnya Pengaruh Mitos dan Informasi yang Kurang Tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino leo. (2016). Dasar Kebijakan Publik. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *2*(5).

BPS Indonesia, S. I. (2023). STATISTICAL YEARBOOK OF INDONESIA 2023. *Statistik Indonesia 2023*, *1101001*.

Gugun, S., & Suskim, R. (2026). Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Pendapatan, Ketimpangan, dan Kemiskinan di Indonesia: Suatu Tinjauan Pustaka Economic Development oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Eco-Latishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *7*(2).

Lezafidyahrestiana, L. F. R. (2024). ANALISIS KARAKTERISTIK IBU DALAM PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI SUNTIK 3 BULAN DI TPMB BD. M DESA CIBENTANG KEC. CISEENG KAB. BOGOR TAHUN 2023. *Jurnal Ilmiah Bidan*, *7*(1). https://doi.org/10.69935/jidan.v7i1.45

Paluku, G. K., Masresha, B. G., Mbaïlamen, A. D., Mbaihol, T., El-hafiz, D. M., Vincent, T., Tamuzi, J. L., Katoto, P. D., Wiysonge, C. S., & Anya, B. P. M. (2025). Investigating persistent measles dynamics associated with population immunity in Chad: a national secondary data model analysis from 2011 to 2025. *IJID Regions*, *16*. https://doi.org/10.1016/j.ijregi.2025.100684

Perpres. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga. *Presiden Republik Indonesia*.

Tomi Sah, & Valeriani, D. (2024). THE EFFECT OF AGING POPULATION, FERTILITY RATES, AND POPULATION GROWTH ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA. *Jurnal Keluarga Berencana*, *9*(1). https://doi.org/10.37306/xx8dpw51

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, *6*(4). https://doi.org/10.1177/009539977500600404

WHO. (2023). Family Planning/ contraception methods. In *World Health Organization* (Vol. 1, Number 9837).

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *3*(1).

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Terbaru)*. Bandung: Alfabeta.
Auliya, N, H, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (2023). *Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam angka*. Barabai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 2025. *Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka 2025*. Barabai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Erni Yunita, T.2023. *Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kecamatan Amuntai Utara.* Skripsi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)

Idham Latif, T.2022 *Implementasi Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di UPT PPKB Kecamatan Indramayu. Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat.* Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang *Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.*

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.